



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI GORONTALO
MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 24 S.D. 28 OKTOBER 2022**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI fokus pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 22 Agustus 2022, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke 3 (tiga) daerah yaitu ke Provinsi Gorontalo, Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

A. Dasar Hukum

- a. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
- b. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI;
- d. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023;
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 22 Agustus 2022 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Gorontalo, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Tujuan

Kunjungan kerja ini ditujukan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di daerah yang dikunjungi.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.I.Pol, Wakil Ketua Komisi X DPR RI beserta anggota Komisi X DPR RI dari berbagai unsur fraksi dan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Bagian Media Cetak dan Media Sosial, serta Bagian TVR Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tim juga didampingi oleh Pejabat Mitra Komisi X DPR RI dari Kemendikbudristek RI, Kemenparekraf RI, Kemenpora RI dan Perpunas RI yaitu:

1. Dr. Drs. Wardani Sugiyanto, M.Pd. selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbudristek RI.
2. Norman Sasono, S.E., M.Si. selaku Kepala Pusat Data dan Informasi, serta Hariyanto, S.Sos., M.M. selaku Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif.
3. Dr. Dwijayanto Saroso Putera selaku Staf Ahli Bidang hubungan Pusat dan Daerah Kemenpora RI.
4. dr. Drs. Joko Santoso, M.Hum. selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpunas RI.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo yang dihadiri:
 - a. Plt Gubernur Gorontalo
 - b. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
 - c. Muspida dan Forkopimda Provinsi Gorontalo.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
 - e. Ketua Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo.
 - f. Dewan Pendidikan, PGRI, Tokoh-tokoh Pendidikan, dan para Pakar Pendidikan Provinsi Gorontalo.
 - g. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo, PHRI, ASITA, PUTRI, dan instansi terkait yang menangani kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Gorontalo.
 - h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
 - i. KONIDA, KNPI, organisasi kepemudaan, dan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo.
 - j. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo.
 - k. Pimpinan PTN, PTS, dan LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo:
 - 1) Rektor Universitas Negeri Gorontalo,
 - 2) Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo,
 - 3) Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo,
 - 4) LLDIKTI Wilayah XIV Gorontalo,
 - 5) Rektor Universitas Gorontalo Limboto
 - 6) Rektor Universitas Ichan Gorontalo
 - 7) Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
 - 8) Direktur Stikes Bina Mandiri Gorontalo

I. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi

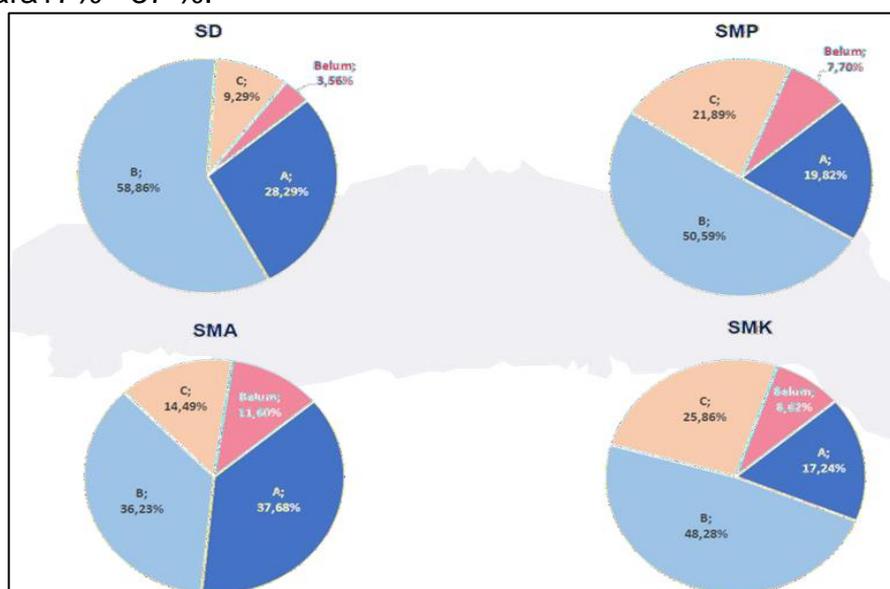
- a. Arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ialah; (1) meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional, (2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, (3) meningkatkan kualitas kurikulum, (4) mengembangkan kerja sama dunia

pendidikan dengan dunia usaha, (5) pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis *entrepreneurship*, (6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan, dan (7) peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan SPM Pendidikan.

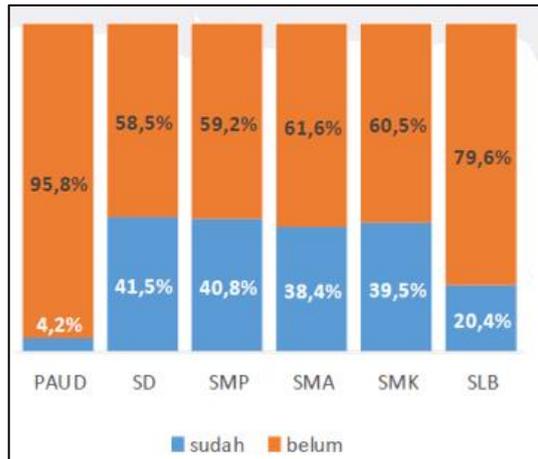
- b. Pada penganggaran sektor pendidikan, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Gorontalo menganggarkan sebesar Rp. 539,4 miliar, jumlahnya turun dari anggaran pendidikan pada tahun 2021 sebesar Rp. 643,7 miliar. Adapun rincian anggaran pendidikan Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

No.	Sektor Pembiayaan	Jumlah
1.	Gaji dan Tunjangan	291,8 M
2.	Belanja Program	59,3 M
3.	Hibah	2,65 M
4.	DAK Fisik (SMA, SMK, SLB)	96 M
5.	DAK Non Fisik (BOS SMA, SMK, SLB)	87,9 M
6.	BOP Museum	1,5 M
	TOTAL	539,4 M

- c. Secara umum kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo terhitung cukup baik, hal tersebut tergambar pada gambar data di bawah, bahwa satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dari SD, SMP dan SMU/SMK rerata memiliki akreditasi B di atas 50%, dan yang berakreditasi A rerata antara 17% - 37%.



- d. Dari sisi spesifikasi kualitas guru, rerata guru di Provinsi Gorontalo belum tersertifikasi. Guru PAUD yang telah tersertifikasi hanya sebanyak 4,2%, guru SD 41,5%, guru SMP 40,8%, guru SMU 38,4% guru SMK 39,5% dan guru SLB 20,4%. Hal tersebut tergambar pada diagram data berikut:



- e. SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) di Provinsi Gorontalo ada 10 SMK yaitu SMKN 2 Gorontalo, SMKN 4 Gorontalo, SMKN 1 Limboto, SMKN 1 Mootilango, SMKN 1 Boalemo, SMKN 1 Paguyaman, SMKN2 Gorontalo Utara dan SMKN 1 Popayato, SMKN 1 Wonosari. SMK-SMK tersebut telah menghasilkan lulusan yang terserap didunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan Pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja.
- f. Evaluasi rekrutmen PPPK untuk guru SMA/SMK/SLB se-Provinsi Gorontalo berlangsung dengan baik namun dari 947 formasi tahun 2021 formasi yang terisi, yang telah mendapatkan SK di tahun 2022 baru sejumlah 326 orang.
- g. Terdapat 24 guru penggerak yang telah memiliki sertifikat guru penggerak dan 73 calon guru penggerak se-Provinsi Gorontalo. 4 orang guru lulusan guru penggerak telah ditetapkan sebagai kepala sekolah. Keberadaan guru penggerak dinilai sangat membantu satuan Pendidikan dalam meningkatkan upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila.
- h. Ruang Lingkup Pelayanan LLDIKTI XVI meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. Adapun kondisi perguruan tinggi (PT) di ketiga provinsi tersebut yaitu:

JENIS	GORONTALO	SULUT	SULTENG	TOTAL
PTS	11	47	32	90
PTN	1	4	1	6
TOTAL	12	51	33	96

Populasi PT di Provinsi Gorontalo paling sedikit dibandingkan provinsi lain. PTN paling banyak terdapat di Provinsi Sulut, dimana terdapat 4 PTN yang terdiri dari 2 universitas dan 2 politeknik. Bentuk PT yang paling dominan di LLDIKTI XVI adalah Sekolah Tinggi . Bentuk PT yang

paling dominan di Provinsi Gorontalo adalah Universitas. Saat ini sedang proses penggabungan 2 sekolah tinggi di Gorontalo menjadi Universitas

- i. Pelayanan LLDIKTI kepada PTN masih terbatas pada pemberian rekomendasi untuk pembukaan prodi baru, PSDKU, PJJ dan penutupan prodi
- j. Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya jumlah angka mahasiswa baru pada tahun 2020 di semua provinsi. Pada tahun 2021, penerimaan mahasiswa baru sudah mulai kembali normal, bahkan sudah mendekati jumlah mahasiswa baru pada tahun 2019. Penerimaan Mahasiswa baru di PTN melalui jalur Mandiri yang dibuka dalam banyak tahapan juga menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan oleh PTS karena kurangnya minat mahasiswa untuk melanjutkan kuliah ke PTS. Berikut data jumlah penerimaan mahasiswa baru dari 3 tahun terakhir:

JENIS	GORONTALO	SULUT	SULTENG	TOTAL
JUMLAH SAAT INI	19.839	38.649	41.780	100.268
MABA 2019	5227	7162	7594	19983
MABA 2020	3342	5878	6478	15698
MABA 2021	5079	6575	7533	19187

- k. Terjadi penurunan kuota reguler KIP Kuliah dari 1481 pada tahun 2021 menjadi 1346 pada tahun 2022 . Kuota regular tahun 2022 distribusikan secara proporsional sesuai dengan jumlah *student body* pada masing-masing PTS dan juga memperhatikan kinerja yang ditunjukkan.
- l. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI yang diatur dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 3 Tahun 2021 di mana LLDIKTI harus meningkatkan jumlah PTS yang minimal 30 persen mahasiswanya pernah beraktivitas di luar prodinya sebanyak minimal 20 SKS. Dengan tuntutan IKU ini, LLDIKTI sangat berperan aktif dalam mengimplementasikan program MBKM.
- m. LLDIKTI juga berperan untuk mendorong PTS melaksanakan program MBKM secara mandiri (di luar program flagship). LLDIKTI membantu Tim Kampus Merdeka Mandiri untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan PTS agar dapat melaksanakan program MBKM secara mandiri dengan lebih optimal sesuai dengan kebutuhan dan keunggulannya.
- n. Berdasarkan data survei yang dilaksanakan pada semester kedua tahun 2022, terdapat 29 PTS yang telah melakukan kegiatan MBKM secara mandiri dan melibatkan 1935 orang mahasiswa. Jumlah ini lebih besar daripada partisipasi pada 3 program flagship utama (MSIB, PKM, PMM) yang hanya diikuti oleh 768 orang mahasiswa.

2. Bidang Kebudayaan

- a. Terdapat isu strategis pemajuan kebudayaan yang menjadi konsen Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu, (1) *mainstreaming* kebudayaan sebagai aset daerah, dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, melalui Program Pembinaan Kebudayaan,

(2) Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), terdapat 345 catatan karya budaya tak benda yang tercatat dalam data budaya Kemendikbudristek RI, dari jumlah tersebut 31 WBTB telah ditetapkan atau sebesar 8,9 persen dari total WBTB terdaftar, dan (3) Advokasi terhadap masyarakat dan *stakeholder* terkait perihal pelestarian dan perlindungan 84 cagar budaya yang tersebar di Provinsi Gorontalo.

- b. Dalam upaya pemajuan kebudayaan, terdapat beberapa langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di antaranya :
 - 1) melakukan sosialisasi ragam adat budaya daerah kepada siswa siswi secara berkelanjutan baik daring maupun luring.
 - 2) bekerjasama dengan lembaga-lembaga kebudayaan baik ditingkat lokal maupun pusat (berupa kegiatan bimtek upacara tradisional, kesenian daerah
 - 3) menghimpun komunitas budaya dan pelaku seni terdampak pandemi Covid 19, untuk kemudian bersama-sama dalam melakukan kegiatan pemajuan kebudayaan dilibatkan dalam proses pelatihan dan sebagai pelaku dalam program kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
- c. Pandemi Covid 19 membuat beberapa kegiatan pemajuan menjadi terhambat dan ditunda, maka beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di antaranya:
 - 1) merubah pola dan sistem pelaksanaan kegiatan (dari yang langsung melalui daring).
 - 2) mendesain ulang acara dan even sehingga dapat menarik bagi peserta.
 - 3) membatasi peserta kegiatan disesuaikan dengan kapasitas tempat dan lokasi penyelenggaraan.
 - 4) meminta dukungan bagi lancarnya kegiatan dan even kepada pihak tertentu seperti Balai Pelestarian Nilai Budaya, Bank Indonesia dan Lembaga Kebudayaan lainnya.
- d. Provinsi Gorontalo pada saat pandemi hingga pasca pandemi telah menetapkan 21 Warisan Budaya Tak Benda dan tercatat ada 350 WBTB yang masih akan terus diupayakan secara bertahap. Ke 21 WBTB adalah, Upiya karanji, molonthalo, mohuntingo, Tidi Lo Oayabu, Ilabulo, Tili Aya, Tapa tonggo, Turunani, Buruda Gorontalo, Bili'u, Tahuda, Leningo, Molo'opu, Dana-dana, Tidi Lo Tihuo, Tidi Lo Maluo, Amongo, Longgo, Mongubingo, Wunungo, dan Tidi Da'a.

3. Bidang Pariwisata

- a. Provinsi Gorontalo termasuk ke dalam Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Wilayah Togean-Gorontalo. Secara geografis Gorontalo berada di antara Provinsi Sulawesi Utara (Destinasi Super Prioritas) Likupang sebagai Penyangga, dan Ibukota Baru Indonesia IKN provinsi Kalimantan Timur. Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki pesona daya tarik yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain.
- b. Arah kebijakan pariwisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu,

- 1) Di bidang promosi, Diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal.
 - 2) Di pengelolaan destinasi, Fokus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu Wisata Religi dan destinasi pariwisata lainnya yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi.
 - 3) Di bidang industri dan kelembagaan, Untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumber daya manusia pariwisata.
- c. Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan kontribusi PDRB sektor pariwisata pada tahun 2023 sebesar 2,5%, tahun 2024 sebesar 3%, tahun 2025 sebesar 3,5% dan tahun 2026 sebesar 3,9%.
- d. Pembangunan Pariwisata difokuskan pada 8 (delapan) lokasi destinasi prioritas yaitu Benteng Otanaha, Wisata Alam Lombongo, Hiu Paus Botubarani, Monumen Sejarah Pendaratan Soekarno Iluta, Wisata religi Bubohu, Pantai Bolihutuo, Pantai Minanga, Wisata Suku Bajo Torosiaje
- e. Target capaian sasaran dalam upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) tergambar pada infografis berikut:

	Indikator Sasaran Pembangunan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Target RPJMD 2022	Interpretasi
	Wisatawan Mancanegara (Orang)	8.532	9.955	1.226	7.937	>
	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	962.568	1.003.730	431.468	759.023	>
	Rata-Rata Lama Tinggal	1,72 hari	1,68 hari	1,55 hari	4 hari	<

Keterangan:

> : sudah tercapai

< : sulit tercapai

Pada gambar di atas, karena pandemi Covid-19 jumlah kunjungan baik wisman dan wisnus mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 jika dibandingkan pada tahun 2019. Dari data di atas juga Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan jumlah hari kunjungan (*longstay*) wisatawan naik 4 hari pada tahun 2022 dari hanya 1,55 hari pada tahun 2021 sekali pun dalam realitanya dianggap masih sulit dilakukan.

- f. Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo agar industri ekonomi kreatif tidak mati dan cepat pulih akibat dari pandemi Covid-19, diantaranya:
- 1) Kebijakan afirmasi penggunaan produk lokal (SE Gubernur).
 - 2) Memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk distribusi bansos (bentor)
 - 3) Mendorong terbentuknya Krisis Center untuk membantu UMKM yang terdampak Pandemi Covid 19.

- 4) Mendorong UMKM untuk mampu membaca peluang untuk penyediaan kebutuhan pemerintah dalam menangani covid. Contohnya: produksi *hand sanitizer*).
 - 5) Mendorong pembelanjaan lewat online dengan memanfaatkan pasar daring lokal (Patali, Todepula, dst).
 - 6) Memberikan bantuan pangan/BANSOS/BALASA kepada karyawan UMKM, pelaku Industri Pariwisata yang dirumahkan saat PSBB dan PPKM.
- g. Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dalam peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pelaku Ekraf di masa pandemi yaitu, (1) kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas SDM Ekraf dalam rangka perluasan pasar produk baik di pasar ekspor maupun domestik dengan bekerjasama Bank Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN Yogyakarta dan (2) peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf di destinasi wisata pantai Minanga.
- h. Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo memberikan masukan untuk RUU Kepariwisataan yaitu:
- 1) Perlu diatur pemberian apresiasi bagi pengembangan suatu kawasan pariwisata dari sisi keunikan dan citra kawasan
 - 2) RUU Kepariwisataan harus mampu mengintegrasikan komplementaritas antar daya tarik wisata
 - 3) Revisi UU Kepariwisataan mampu meningkatkan penelitian kebutuhan suatu obyek, khususnya melalui riset pasar, secara regional, nasional dan global.
 - 4) Perlu mengatur lebih detail bentuk koordinasi dan penataan pelaku wisata serta pemangku wisata lain.
 - 5) RUU Kepariwisataan mampu mendorong kehadiran atau jumlah kunjungan wisatawan dengan kemudahan akses dan pengaturan harga tiket perjalanan/pemaketan pariwisata.
 - 6) Mampu mendorong bertambahnya jumlah kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
 - 7) RUU Kepariwisataan mampu mendorong peningkatan sarana prasarana pariwisata daerah melalui peningkatan DAK, DEKON bidang pariwisata.

4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

- a. Pandangan dan harapan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat Gorontalo terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Tersosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 baik di kalangan Pemerintah, Swasta dan masyarakat Gorontalo.
 - 2) Penguatan regulasi dari pembinaan olahraga pada satuan pendidikan.
 - 3) Penguatan regulasi tentang pembudayaan olahraga di masyarakat desa melalui Kementerian Desa
 - 4) Penguatan regulasi tentang olahraga pariwisata dari kementerian terkait.
 - 5) Adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan UMKM dalam bidang olahraga yang ada di Gorontalo.

- 6) Desnitasi wisata di Gorontalo tersedianya sarana dan prasarana Olahraga.
 - 7) Kemendikbud tentang adanya sport center di Provinsi Gorontalo
 - 8) Olahraga tradisonal Gorontalo yang dapat ditetapkan menjadi warisan budaya Gorontalo.
 - 9) Penyelenggaraan event nasional maupun Internasional yang dilaksanakan di Gorontalo.
- b. Evaluasi terhadap program-program kepemudaan, khususnya dalam hal pemberdayaan pemuda, pengembangan, kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pembinaan oraganisasi kepemudaan, pembinaan olahraga prestasi, serta pembinaan gerakan pramuka di Provinsi Gorontalo masih memiliki kendala dan permasalahan diantaranya sebagai berikut:
- 1) Rendahnya tingkat pendidikan pemuda yang dapat ditunjukan antara lain terjadinya konflik atau tauran yang melibatkan kelompok pemuda serta masalah penghayatan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dikalangan pemuda masih dinilai rendah. Masalah lainnya adalah kecilnya anggaran pembangunan kepemudaan sehingga menimbulkan rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemberdayaan pemuda dan kegiatan kepemudaan lainnya khususnya di Provinsi Gorontalo.
 - 2) Masalah pengembangan kepemimpinan sudah terlaksana meskipun belum terpenuhinya di kabupaten dan kota disebabkan keterbatasan pendanaan kurang tersedia.
 - 3) Pengembangan kewirausahaan yakni kurangnya pembinaan melalui pelatihan kewirausahaan pemuda.
 - 4) Kurangnya pembinaan dalam organisasi kepemudaan melalui pembinaan dan pelatihan kepemudaan.
- c. Pandangan dan harapan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diantaranya sebagai berikut:
- 1) Tersosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 baik di kalangan Pemerintah, Swasta dan masyarakat Gorontalo.
 - 2) Penguatan regulasi tentang pembudayaan olahraga di masyarakat desa melalui Kementerian Desa, dan penguatan regulasi tentang olahraga parawisata dari kementerian terkait;
 - 3) Adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan UMKM dalam bidang olahraga yang ada di Gorontalo.
 - 4) Desnitasi wisata di Gorontalo tersedianya sarana dan prasarana olahraga.
 - 5) Kemendikbudristek tentang adanya *sport center* di Provinsi Gorontalo
 - 6) Olahraga tradisonal Gorontalo yang dapat ditetapkan menjadi warisan budaya Gorontalo.
 - 7) Penyelenggaraan event nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Gorontalo, penguatan regulasi dari pembinaan olahraga pada satuan pendidikan.

5. Bidang Perpustakaan

- a. Kemudahan akses terhadap bahan bacaan, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga perpustakaan, penguatan digitalisasi perpustakaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan.
- b. Arah kebijakan Pemerintah Daerah Gorontalo di bidang literasi sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat.
 - 2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah.
 - 3) Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat.
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.
 - 5) Target sasaran 2023-2026 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebesar 57,64.
 - 6) Indeks pembangunan literasi masyarakat di provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sebesar 28,18, dengan jumlah perpustakaan sebanyak 2.276 yang didominasi jenis perpustakaan sekolah atau madrasah sebanyak 1.314 dengan perpustakaan berSNP sebesar 16,7 % mayoritas dari perguruan tinggi.
 - 7) Sedangkan koleksi buku ada sebanyak 152.068 dengan jenis buku terbanyak sejumlah 23.334 buku IPS dengan buku yang paling banyak dipinjam sebanyak 24.074 buku geografi. Keseluruhan jumlah anggota perpustakaan ada sebanyak 169.657 yang rata-rata kunjungan perhariada 511 orang dengan usia diatas 18 tahun sebesar 54,5%, dengan 75,6% berstatus pelajar atau mahasiswa.

B. Permasalahan dan Temuan

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi

- a. Terkait pelaksanaan penyaluran bantuan PIP menemukan sejumlah masalah di antaranya (1) terdapat kesenjangan antara peserta didik yang layak menerima dengan kuota yang ditetapkan dan (2) terdapat ketidakvalidan NIK calon penerima PIP yang diusulkan, sehingga mengakibatkan siswa tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai penerima.
- b. Penyaluran bantuan BOS di beberapa satuan pendidikan masih mengalami keterlambatan pencairan dana BOS dari pusat ke rekening sekolah.
- c. DAK Non Fisik dalam hal ini Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru SMA/SMK/SLB yang sedianya dananya sudah tersedia di setiap awal triwulan, untuk dana triwulan triwulan III sampai dengan hari ini belum masuk ke kas daerah.
- d. Terkait implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, terdapat Interpretasi yang berbeda terhadap pelaksanaan Kepmen 50 tahun 2020 yang mengatur daerah memiliki kewenangan muatan lokal sementara

daerah dituntut untuk mengintervensi perubahan paradigma baru pembelajaran melalui; kurikulum merdeka.

- e. Permasalahan yang sering muncul pada pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya pada distribusi informasi yang belum lancar sehingga PTS sering terlambat mengetahui atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait program-program tersebut di atas. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi PTS dalam lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI pada program yang diselenggarakan oleh kementerian.
- f. Distribusi informasi yang kurang optimal juga menyebabkan rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap program kementerian. Misalnya, masih banyak perguruan tinggi dan mahasiswa yang belum memahami secara utuh esensi dari Program Kampus Merdeka, sehingga program tersebut tidak dimanfaatkan. Kendala ini terjadi juga karena LLDIKTI Wilayah XVI yang baru terbentuk dan pada tahap awal lebih fokus pada konsolidasi SDM (pegawai) dan penyelenggaraan pelayanan dasar serta belum menyentuh aspek yang strategis dan substantif.
- g. Permasalahan lain yang sering dikeluhkan oleh PTS terkait program-program dari kementerian adalah sulitnya untuk mendapatkan hibah/insentif dari program tersebut karena harus bersaing dengan PT dari wilayah lain yang lebih unggul. Karena sulitnya bersaing, diharapkan ada diskresi, afirmasi atau sistem zonasi untuk usulan dari PTS-PTS yang berasal dari wilayah timur sehingga berpeluang untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.
- h. Peringkat akreditasi yang masih rendah juga sering kali menjadi kendala PTS untuk mengakses program-program dari Kementerian karena peringkat akreditasi tertentu sering menjadi syarat untuk berpartisipasi pada program-program tersebut.

2. Bidang Kebudayaan

- Tidak ada data –

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Pemerintah Provinsi Gorontalo menghadapi kendala utama dalam penyelenggaraan pariwisata di antaranya, (1) kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen amenities, atraksi, maupun aksesibilitas, (2) kurangnya industri usaha pariwisata yang terstandarisasi, (3) kurangnya pemahaman masyarakat di destinasi wisata, (4) belum optimalnya pengembangan industri kreatif, (5) masih kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten, dan (6) strategi pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu.
- b. Pada aspek pelaksanaan, penyelenggaraan pariwisata mengalami kendala sebagai berikut; (1) Rendahnya penyediaan destinasi yang menawarkan produk yang beragam dan jasa wisata yang handal, (2) Masih rendahnya jaminan kemudahan akses, kenyamanan, kebersihan dan keamanan, (3) Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas, dan (4) Masih rendahnya investasi di usaha wisata

4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

- a. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda yang dapat ditunjukkan antara lain terjadinya konflik atau tauran yang melibatkan kelompok pemuda serta masalah penghayatan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dikalangan pemuda masih dinilai rendah. Masalah lainnya adalah kecilnya anggaran pembangunan kepemudaan sehingga menimbulkan rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemberdayaan pemuda dan kegiatan kepemudaan lainnya khususnya di Provinsi Gorontalo.
- b. Masalah pengembangan kepemimpinan sudah terlaksana meskipun belum terpenuhinya di kabupaten dan kota disebabkan keterbatasan pendanaan kurang tersedia.
- c. Pengembangan kewirausahaan yakni kurangnya pembinaan melalui pelatihan kewirausahaan pemuda.
- d. Kurangnya pembinaan dalam organisasi kepemudaan melalui pembinaan dan pelatihan kepemudaan.

5. Bidang Perpustakaan dan Literasi

- a. Kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial, seluruh kabupaten dan kota sudah dapat namun baru 22 kelurahan yang mendapatkan, terkait hal tersebut perlu bantuan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca.
- b. Saat ini Pemerintah Daerah Gorontalo melibatkan banyak komunitas termasuk perpustakaan desa kelurahan, untuk membangun sarpras akan tetapi terkendala regulasi, sehingga aspirasi kami, perpustakaan di seajarkan dengan opd lainnya seperti Pendidikan yang di patok 20%, jumlah penduduk sebanyak sejutaan.
- c. Terkait dengan bantuan transformasi ada internet namun ada kelurahan yang masih *blink spot*.
- d. Perlunya advokasi dan pengarusutamaan budaya literasi.

C. Diskusi dan Pembahasan

Berikut ringkasan diskusi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo. Beberapa masukan yang disampaikan di antaranya sebagai berikut:

1. **Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Gorontalo, Hamka Hendra Noer** dalam kesempatannya menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi di antaranya:
 - a. Kemudahan dan kemampuan memperoleh layanan pendidikan di Provinsi Gorontalo sudah cukup baik walaupun terdapat beberapa wilayah yang memerlukan afirmasi serta dukungan jalan maupun moda transportasi alternatif.
 - b. Tidak semua penduduk usia sekolah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di mana jenjang terendah adalah kelompok umur 19 sd 23 (34,68%), diikuti kelompok umur 16 sd 18 (71,03 %) dan kelompok umur 13 sd 15 (92,05%).
 - c. APK penduduk perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk setiap tingkat pendidikan, meskipun demikian dari sisi rasio

laki-laki dan perempuan untuk keseluruhan jenjang pendidikan mengalami perbaikan capaian APK dan APM

- d. Kondisi anak yang tidak berkesempatan menyelesaikan pendidikan disebabkan faktor pernikahan usia dini, *mindset* pentingnya bersekolah, kondisi ekonomi khususnya pada saat pandemi.
- e. Kecakapan literasi dan numerasi di seluruh jenjang pendidikan perlu di dioptimalkan pencapaiannya di antaranya melalui peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta perbaikan sarana prasarana pendukung.
- f. Ketersediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan harus dipastikan keterpenuhannya, khususnya pada jenjang pendidikan PAUD dan SMK (Guru Produktif).
- g. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui pelatihan, sertifikasi terhadap seluruh guru, pemberian insentif terhadap guru yang berada di wilayah afirmasi/terpencil (Pinogu dan Saritani).
- h. Ukuran capaian satuan pendidikan terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan. Saat ini masih ada satuan Pendidikan yang masih akreditasi C (14,49% SMA – 25,86% SMK).
- i. Ketersediaan dan validitas data Dapodik sebagai rujukan pengambilan kebijakan perlu dibenahi.

2. **Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo** dalam kesempatannya menyampaikan beberapa usulan dan aspirasi sebagai berikut:

- a. Terkait pemberian dukungan bantuan DAK, mengusulkan (1) perlu pelibatan daerah dalam penetapan lokus penerima DAK fisik, (2) perlu penyesuaian harga satuan bangunan gedung dengan standar satuan harga regional daerah, (3) perlu pengalokasian honorarium bagi pengelola DAK fisik, (4) perlu pengalokasian anggaran koordinasi/konsultasi ke pusat terkait pelaksanaan DAK fisik, (5) perlu pelibatan tim DAK provinsi dalam penyusunan jukpos DAK.
- b. Terdapat 14 sekolah penggerak di Provinsi Gorontalo dianggap membantu daerah dalam menciptakan atmosfir pembelajaran yang baik di tingkat satuan pendidikan namun diharapkan ke depan kiranya kuota sekolah penggerak di daerah bisa bertambah jumlahnya dan sebarannya bisa diperluas. untuk sekolah swasta yang mengikuti program sekolah penggerak membutuhkan regulasi/ beberapa ketentuan yang mengatur terkait dukungan penuh dari yayasan untuk kelancaran program di satuan pendidikan.
- c. Dalam penyaluran bantuan PIP, masih terdapat ketidakvalidan NIK penerima PIP, namun sudah diatasi, dengan pemberian honorarium bagi tenaga teknis untuk melakukan update data.
- d. Masih sering terjadi keterlambatan pencairan BOS tiap tahun pada semua satuan pendidikan (1-2 bulan dari tiap triwulan)
- e. Daerah membutuhkan Bimtek untuk pengelola kebhendahaaran BOS pada setiap tingkat satuan pendidikan.
- f. Masih terdapat persepsi yang berbeda dalam implementasi materi muatan lokal yang di atur di dalam Kepmen 50 tahun 2020 yang mengatur daerah memiliki kewenangan muatan lokal sementara

daerah dituntut untuk mengintervensi perubahan paradigma baru pembelajaran melalui; kurikulum merdeka.

- g. Perlu sinkronisasi penerjemah Pusdatin dan dinas pendidikan terkait platform-platform media atau aplikasi pembelajaran yang sedang dikembangkan oleh Kemendikbudristek RI.
 - h. Pada tahun 2021 terdapat 947 formasi yang terisi, namun hingga yang telah diterbitkan SKnya di tahun 2022 baru sejumlah 326 orang. Mengharapkan agar peserta PPPK yang telah masuk *passing grade* pada tahun 2021, pada seleksi tahap III tahun 2022 tidak perlu mengikuti seleksi lagi, tapi langsung diangkat menjadi guru PPPK untuk memenuhi kekurangan kebutuhan guru di Gorontalo.
 - i. Program sekolah penggerak telah membawa pengaruh signifikan bagi perkembangan pembelajaran di Gorontalo, saat ini terdapat 14 sekolah penggerak di Provinsi Gorontalo.
 - j. Terdapat 73 calon guru penggerak, 24 guru telah menjadi guru penggerak, 4 guru di antaranya telah diangkat menjadi kepala sekolah.
3. **Kepala LLDIKTI XVI (Sulteng, Sulut dan Gorontalo)** menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi di antaranya:
- a. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kesulitan untuk bersaing secara nasional untuk program yang sifatnya kompetitif dengan PT Jawa atau daerah lain yang PT-nya jauh lebih maju, mengusulkan perlu zonasi atau afirmasi agar PT Gorontalo tidak bersaing dengan PT Jawa.
 - b. Pelaksanaan MBKM sudah dilakukan secara mandiri, seperti KKN tematik. Terdapat lebih dari 29 PT sudah melakukan MBKM dengan jumlah 1500 mahasiswa ikut terlibat MBKM. Dalam pelaksanaan MBKM di Provinsi Gorontalo masih kesulitan untuk melakukan kerjasama pemagangan di industri (perlu kerjasama Kadin dan HIPMI).
4. **Perwakilan Universitas Negeri Gorontalo** (Bidang kerjasama dan informasi) menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi diantaranya:
- a. Saat ini sekitar 42% mahasiswa di UNG merupakan penerima program KIP kuliah, adapun jumlah penerima bantuan UKT pada saat pandemi Covid 19 sebanyak 13.326 mahasiswa.
 - b. Pada tahun 2021-2022 UNG masih melakukan relaksasi UKT kepada mahasiswa, baik dalam bantuan kebijakan angsuran atau penurunan biaya UKT untuk hampir 4000 mahasiswa.
 - c. Pelaksanaan MBKM di UNG sudah mendapatkan bantuan hibah untuk menjalankan 8 program MBKM. Program MBKM mandiri juga dilakukan namun terhambat berkomunikasi dengan industri. Kendala lain pada pelaksanaan MBKM di UNG ialah adanya beban biaya tambahan bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM di luar daerah.

5. **Perwakilan Universitas Swasta (Universitas Ikhsan Gorontalo)** menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi di antaranya:
 - a. Terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar di PTS sejak kasus terjadinya pandemi Covid 19.
 - b. Karena turunnya kemampuan ekonomi, hampir 50% mahasiswa belum kembali ke bangku perkuliahan. Maka solusi dari kampus yaitu adanya kebijakan angsuran atau memutihkan biaya bagi mahasiswa yang mengalami penurunan kemampuannya akibat pandemi Covid 19 masih membutuhkan bantuan UKT dan KIP.
 - c. Terjadi ketidakseimbangan kuota KIP kuliah PTN dan PTS, dan meminta agar kuota KIP kuliah untuk PTS ditambah.
 - d. Mengusulkan agar kuota kampus PTN di Jakarta atau Jawa yang tidak terserap dialihkan kemudian diserahkan ke PT daerah yang membutuhkan.
 - e. Perlu biaya tambahan yang membebani untuk memberangkatkan mahasiswa yang mengikuti magang keluar daerah Gorontalo karena kurangnya industri di Gorontalo.
 - f. Perlu pembatasan jalur mandiri PTN agar PTS juga mendapatkan pendaftar mahasiswa baru.

6. **Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo** (Bagian Pengembangan dan Pemasaran) menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi diantaranya:
 - a. Saat ini terdapat 121 destinasi di Provinsi Gorontalo, 2 destinasi dikelola oleh Pemprov dan 8 destinasi telah diusulkan menjadi destinasi pariwisata prioritas.
 - b. Jumlah *long stay* (jumlah hari kunjungan) wisatawan di Provinsi Gorontalo hanya 1,5h hari karena harus bersaing dengan destinasi wilayah Indonesia Timur lain seperti Provinsi NTT, Bali dan Sulawesi Selatan.
 - c. Industri Ekraf di Provinsi Gorontalo telah dibantu perluasan pasar produksinya, namun masuk perlu dikerjasamakan dengan Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM
 - d. Meminta agar kalender even pariwisata nasional untuk Provinsi Gorontalo waktu pelaksanaannya tidak disamakan dengan daerah lain yang sudah berjalan lama dan lebih populer, seperti Festival Jogja Karnaval.
 - e. Mengusulkan agar destinasi-destinasi pariwisata di Gorontalo masuk sebagai destinasi prioritas sebagai penyangga destinasi super prioritas Likupang untuk mendorong munculnya sektor usaha baru.
 - f. Mengusulkan agar ada konsistensi pemberian DAK pariwisata bagi daerah yang memiliki alokasi APBD minim. Provinsi Gorontalo tercatat sudah dua tahun tidak mendapatkan bantuan DAK untuk sektor pariwisata.
 - g. Meminta agar Teluk Tomoni dikembangkan menjadi daerah penyangga pariwisata dengan segala kelebihannya di antaranya sebagai teluk terpanjang dunia, dan terdapat sekitar 3000 penduduk desa di Teluk Tomoni yang menggantungkan hidup di Teluk Tomoni.

7. **Marthin/Ketua ASITA** menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi diantaranya:
 - a. Harga tiket yang sangat tinggi sangat membebani wisatawan hadir ke Gorontalo. Harga avtur di Malaysia lebih murah dan jumlah penerbangan ke Gorontalo yang kurang membuat harga tinggi tiket ke Gorontalo.
 - b. Sektor pariwisata adalah sektor yang tidak mendapatkan perhatian dalam pemberian bantuan kredit bagi pelaku pariwisata dan memiliki skor buruk oleh bank bagi pelaku pariwisata yang melakukan restrukturisasi usahanya.
 - c. Syarat untuk telah melakukan booster menjadi kendala masuknya wisman khususnya yang berasal dari negara Eropa yang hanya di negaranya hanya mewajibkan melakukan vaksin dua kali.

8. **Direktur Eksekutif BPPD Provinsi Gorontalo, Yanuar (Ketua PHRI)** menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi diantaranya:
 - a. Menyampaikan terdapat keluhan pelaku perhotelan atas RUU KUHP pasal perzinahan yaitu aturan syarat bagi *costumer* hotel yang membawa pasangan hanya diperbolehkan bagi yang berstatus pasangan resmi yang telah menikah. Pasal RUU ini akan menjadi dasar dilakukannya operasi-operasi penindakan yang akan mengganggu pengunjung hotel akhirnya menciptakan iklim usaha perhotelan terganggu.
 - b. Telah terbentuk BPPD di Provinsi Gorontalo agar promosi dan pemasaran pariwisata dilakukan lebih baik.
 - c. BPPD akan tetap eksis selama BPPID masih diatur di dalam Undang-Undang Kepariwisata.
 - d. Mahalnya harga tiket dan kurangnya jumlah *flight* ke Gorontalo membuat banyak calon wisatawan melakukan pembatalan kunjungan ke Gorontalo.
 - e. Industri pariwisata membutuhkan banyak SDM pariwisata lulusan perguruan tinggi, namun di Gorontalo yang ada saat ini hanya ada jenjang D-3 pariwisata di UNG, sehingga minat pelajar melanjutkan pendidikan dengan mengambil jenjang pendidikan pariwisata sangat kurang.

9. **Direktur Pendidikan Vokasi UNG** menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi diantaranya:
 - a. Pariwisata Provinsi Gorontalo membutuhkan SDM yang banyak dan berkualitas, namun saat ini hanya ada prodi pendidikan pariwisata D-3 yang kurang diminati oleh calon mahasiswa, sehingga mengusulkan agar dibukanya jenjang minimal D-4 program pariwisata di Provinsi Gorontalo.
 - b. Mengusulkan dibukanya prodi Manajemen Perhotelan D-4 di UNG. Proses pengusulan pembukaan prodi sudah dilakukan, namun belum mendapatkan respon dari Kemendikbudristek RI.

10. **Perwakilan Kadin Provinsi Gorontalo** menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi di antaranya:
 - a. Di dalam RUU Kepariwisata nantinya perlu di atur agar CSR perusahaan juga bisa dialokasikan untuk tujuan kepariwisataan.
 - b. Meminta Komisi X DPR RI untuk membantu melobi *World Bank* untuk mendapat pembiayaan pendirian LSP di Gorontalo.

11. **Perwakilan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)** menyampaikan beberapa informasi dan aspirasi diantaranya:
 - a. Wisatawan asing terkesan dengan keramahan masyarakat Gorontalo sehingga membuat kesan baik bagi industri pariwisata Gorontalo
 - b. Tidak sedikit dari wisatawan mancanegara mengambil *long stay* lebih lama di Gorontalo, dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan untuk mengunjungi berbagai lokasi destinasi pariwisata di Provinsi Gorontalo. Maka mengusulkan agar proses perpanjangan ijin tinggal termasuk visa wisatawan tidak dipersulit dan dilakukan melalui birokrasi yang singkat.
 - c. Memohon agar promosi pariwisata Gorontalo lebih gencar dilakukan di tempat-tempat strategis khususnya seperti di bandara dan pelabuhan.

12. **Dr. Drs. Wardani Sugiyanto, M.Pd** (Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbudristek RI) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan pencairan dan BOS terjadi karena tidak sinkronisasinya data yang disampaikan oleh sekolah dengan data DAPODIK, akan meminta agar sekolah, Pemda dan Kemendikbudristek meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi.
 - b. Kurikulum merdeka mendukung hanya mengatur materi muatan ajar yang bersifat esensial, adapun untuk materi ajar muatan lokal yang lebih mendalam diberikan kepada daerah.
 - c. Meminta agar kebijakan pengangkatan kepala sekolah diambil dari lulusan guru penggerak, yang ditargetkan sampai 2024 mencapai 50.000. kebijakan selanjutnya kepala sekolah, kepala dinas dan pengawas diambil dari guru lulusan program Guru Penggerak.

13. **Norman Sasono, S.E., M.Si.** (Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenparekraf RI) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Perlu sinkronisasi data wisnus dan wisman dan tenaga kerja bidang pariwisata dengan dinas–dinas pariwisata daerah. Saat ini Kemenparekraf menggunakan metode *Mobile Positioning Data* untuk melakukan pendataan potensi wisata nasional.
 - b. Target 4 hari *long stay* wisman di Provinsi Gorontalo menurut data Kemenparekraf RI sudah tercapai.
 - c. Untuk penyusunan kalender even pariwisata nasional akan disusun ulang sesuai masukan Dinas Pariwisata Gorontalo agar tidak merugikan even kegiatan wisata Gorontalo dan daerah lain.
 - d. Kemenparekraf RI saat ini sangat aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan penurunan harga tiket pesawat, termasuk dari ke Provinsi Gorontalo akan menjadi prioritas.

- e. Menjanjikan Provinsi Gorontalo pada 2023 akan menjadi tuan rumah even pelatihan industri dan usaha pariwisata nasional.
- f. *World Bank* memiliki kriteria ketat dalam memberikan bantuan pendirian LSP, maka menyarankan agar cukup menggunakan pembuatan LSP yang bersumber dari APBN.
- g. Dukungan CSR sudah bisa dilakukan untuk wisata khususnya untuk pengembangan desa-desa wisata, seperti yang sudah dilakukan oleh ASTRA, BCA, BNI dll.
- h. Pendirian prodi D-4 Management Hotel di UNG boleh menjadikan Poltekpar-Poltekpar milik Kemenparekraf RI sebagai *benchmark*.

14. Kepala Dinas Perpustakaan

- a. Kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial, seluruh kabupaten/kota sudah dapat namun baru 22 kelurahan yang dapat, terkait bantuan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca.
- b. Saat ini kita melibatkan banyak komunitas termasuk perpustakaan desa kelurahan, untuk membangun sarpras terkendala regulasi, sehingga aspirasi kami, perpustakaan di sejajarkan dengan opd lainnya seperti Pendidikan yang di patok 20%, jumlah penduduk sebanyak sejutaan,
- c. Terkait dengan bantuan transformasi ada internet namun ada kelurahan yang masih *blink spot*.

15. Dinas Pemuda Provinsi Gorontalo

- a. Pandangan dan harapan pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan harapannya dapat tersosialisasi dengan baik di Gorontalo.
- b. Penguatan regulasi dari Kemendikburistek tentang pembibitan di pelajar, selama ini masih ada keengganan dari pihak sekolah terhadap siswa dan siswi, sedangkan terkait kementerian desa kita dituntut meningkatkan sport index, di desa diminta olahraga namun belum dianggap penting untuk berolahraga.
- c. Ada fasilitas pantai olele sebagai sarana drafling atau snorkling, ada sepak takraw sudah mendunia.
- d. UMKM membuat anyaman bola sepak takraw, agar ada peningkatan UMKM tersedianya sarpras, dan perlu adanya *sport center* sekitar 10-15 M anggarannya.
- e. Merintis olahraga tradisional namanya lompat tunggu juara 1, ada championship sepak takraw, namun anggaran kemenpora belum dapat tambahan.
- f. Bidang pora sosialisasi masih kurang, diperlukan penguatan regulasi dengan Kemendikbudristek.
- g. Bibit SMP melanjutkan SMA 6 untuk melanjutkan calon atlet yang berprestasi. Pemerintah daerah Gorontalo membuka SMAN 6 untuk menerima siswa yang berbakat atlit dengan memberikan beasiswa
- h. Perlu perhatian pemerintah terhadap UMKM, dulu ada bantuan wirausaha pemuda agar kelompok muda bisa dipicu kewirausahaannya dari pemuda.

16. **Pramuka**
 - a. Gerakan pramuka mendapatkan dukungan lebih dari pemda provinsi, tahun 2012 tunggul tergiat se-Sulawesi, rentang perkembangan kami dari siaga, penggalang dan pelatih. Pembina kami bagi dari 6 kabupaten dan kota di Gorontalo berjalan dengan baik.
 - b. Berharap agar ada bantuan anggaran untuk pramuka dari Komisi X DPR RI.

17. **Kemenpora**
 - a. Terkait dengan UU No. Tentang Keolahragaan supaya tersosialisasi, Kemenpora RI sudah melakukan sosialisasi nanti pada saatnya akan sampai di Gorontalo.
 - b. Regulasi Permenpora No.10 Tahun 2022 Tentang Sentra Pembinaan Olahraga di sekolah sudah dijelaskan dan sudah kerjasama dengan Kemendikbudristek RI. Kemenpora RI sudah membicarakan dengan Gubernur dan Deputi bahwa pada tahun 2023 akan menjadi tuan rumah puncak Haornas, untuk menuju puncaknya Haornas agar diadakan kegiatan *road to haornas* misalnya Gorontalo *open take* ke atau festival olahraga tradisional, atau olahraga pantai, misalnya volley pantai dengan ketentuan khusus untuk kostumnya akan diatur
 - c. *Sport tourism* F1HO, perlu digalakkan, kami baru pulang dari Korsel dengan KOI bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Asean Games di Bali.

18. **Perpustakaan Nasional**
 - a. Penguatan literasi masuk prioritas nasional, agar menjadi ruang publik, ada 23 lokus perpustakaan, transformasi inklusi sosial 2021, ada dukungan layanan perpustakaan untuk renovasi penabahan koleksi dll.
 - b. Soal konektivitas layanan perpustakaan keliling menjadi solusi yang baik.
 - c. Sudah di replikasi di Gorontalo terkait perpustakaan baik kontekstual dalam layanan inklusi sosial, seperti di desa ada intervensi jika ada perpustakaan sebaiknya Permendesa Nomor 2 Tahun 2022 sudah memungkinkan dana desa untuk membangun perpustakaan desa dari Musrebangdes.

19. Komisi X DPR RI dalam tanggapannya melalui Prof. Djohar Arifin Husein, Bapak Andreas Hugo Pareira, Bapak Ferdiansyah, dan Bapak Elnino M. Husein Mohi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mendorong agar Kemendikbudristek RI memperhatikan keberadaan tenaga kependidikan/operator yang bertugas teknis menginput data ke BAN SM dan DAPODIK yang merupakan acuan pengambilan kebijakan pendidikan terindikasi terjadinya ketidaksesuaian data satu sama lain.
 - b. Mendorong agar ada kebijakan *treatment* khusus bagi PTS di luar pulau Jawa, tanpa harus melihat kualitas akreditasinya. PT yang memiliki nilai akreditasi rendah justru merupakan PT yang harus diintervensi oleh Pemerintah.

- c. Mendorong agar pemerintah daerah harus memiliki inisiatif untuk mempromosikan potensi wisata daerahnya lebih awal, agar mendorong pemerintah pusat untuk memperhatikan.
- d. Mengusulkan agar Provinsi Gorontalo mengusulkan diri untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) agar menjadi dasar pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olahraga di Provinsi Gorontalo.
- e. Mendorong agar Lembaga TNI–Polri terlibat dalam pemajuan prestasi nasional olahraga nasional sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Keolahragaan bahwa pengembangan prestasi olahraga bisa melibatkan kampus dan lembaga lain termasuk lembaga TNI-Polri.

D. Kunjungan Lapangan

No	Lokasi	Temuan
1.	SMP Negeri 7 Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> a. SMP Negeri 7 Gorontalo merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Limba U Dua, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo. Dalam menjalankan kegiatannya, SMP Negeri 7 Gorontalo berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi b. Sekolah yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1982 ini beralamat di Jl. Ahmad Nadjamudin, Limba U Dua, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo c. Sekolah kerap mengalami banjir akibat kontur tanah yang tidak merata sehingga mengganggu proses pembelajaran siswa. d. Peran Komite Sekolah sangat penting dalam peningkatan sarana dan prasarana. Tahun 2021 komite sekolah secara swadaya merehabilitasi setidaknya dua ruang kelas belajar. e. Terindikasi satuan pendidikan memberikan data yang tidak akurat di DAPODIK terkait kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana untuk tujuan akreditasi sekolah sehingga luput dari pemberian dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah f. Data di Badan Akreditasi Nasional Sekolah – Madrasah (BAN SM) tidak sesuai dengan data DAPODIK.
2.	SMK Negeri 2 Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> a. SMK Negeri 2 Gorontalo beralamat di Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No.44, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo. SMK ini merupakan SMK Pusat Keunggulan. b. Saat ini jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di SMK Negeri 2 Gorontalo sebanyak 1342 dengan jumlah guru sebanyak 105. c. Membutuhkan guru desain yang mampu mengajarkan mata pelajaran desain berbasis digital untuk pembuatan desain kerajinan tangan kerawu. d. SMK ini memiliki fokus kompetensi keahlian di bidang tata boga, tata busana, tata kecantikan, perhotelan, Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) dan multimedia.

		<p>e. Pada program tata boga, telah mendapatkan program pemagangan bagi tenaga guru dan bantuan alat masak dari Pemerintah Austria melalui Kemendikbudrsitek RI.</p> <p>f. Program Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian, telah bekerja sama dengan UD Flamboyan berupa penyediaan tenaga pendidik.</p>
3.	SMA 6 Gorontalo	<p>a. Sekolah ini terhitung sebagai sekolah yang masih berusia muda, yaitu berdiri pada tanggal 18- 12 – 2019, dengan jumlah pendaftar pertama sebanyak 39 peserta didik. Saat ini jumlah peserta didik sebanyak 113 dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 15 orang serta tenaga pendidikan sebanyak 5 orang.</p> <p>b. Sekolah ini merupakan sekolah rintisan keberbakatan olahraga dengan spesialisasi cabang olahraga sepakbola</p> <p>c. SMA 6 Gorontalo lolos sebagai Sekolah Penggerak bersama 4 sekolah dengan status/brand sebagai sekolah olahraga.</p> <p>d. Usia sekolah masih 3 tahun sehingga masih membutuhkan banyak bantuan dan dukungan.</p> <p>e. Pada tahun 2022 ditetapkan sebagai sekolah olahraga, di dalamnya ada 1 kelas sebagai kelas reguler olahraga dan 1 kelas sebagai sekolah penggerak.</p>

II. KESIMPULAN

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

- Secara umum penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Gorontalo terhitung belum cukup berjalan baik, meskipun dari sisi akreditasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan dari SD, SMP dan SMU/SMK rerata memiliki akreditasi B di atas 50%, dan yang berakreditasi A rerata antara 17% - 37 %. Dari data yang diterima, sebagian besar guru di Provinsi Gorontalo belum tersertifikasi.
- Terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan Provinsi Gorontalo seperti (1) terdapat kesenjangan antara jumlah peserta didik yang layak menerima dengan kuota yang ditetapkan, (2) terdapat ketidakvalidan NIK calon penerima PIP yang diusulkan, sehingga mengakibatkan siswa tidak bisa ditetapkan sebagai penerima, (3) penyaluran bantuan BOS di beberapa satuan pendidikan masih mengalami keterlambatan pencairan dana BOS dari pusat ke rekening sekolah (4) DAK Non Fisik dalam hal ini Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru SMA/SMK/SLB sering mengalami keterlambatan pencairan, (5) terindikasi adanya sekolah memberikan data yang tidak akurat di DAPODIK terkait kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana untuk tujuan akreditasi sekolah, akhirnya data di Badan Akreditasi Nasional Sekolah – Madrasah (BAN SM) tidak sesuai dengan data DAPODIK dan (6) terdapat interpretasi yang berbeda terhadap pelaksanaan Kepmen 50 tahun 2020 yang mengatur daerah memiliki kewenangan muatan lokal.

3. Pada penyelenggaraan pendidikan tinggi di Provinsi Gorontalo, terjadi penurunan angka mahasiswa baru pada tahun 2020 di semua PT di Provinsi Gorontalo akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Selain itu karena turunnya kemampuan ekonomi, hampir 50 % mahasiswa belum kembali ke bangku perkuliahan.
4. Adapun keluhan yang disampaikan oleh PTS di Provinsi Gorontalo ialah penerimaan Mahasiswa baru di PTN melalui jalur Mandiri yang dibuka mengakibatkan kurangnya minat calon mahasiswa untuk melanjutkan kuliah ke PTS. Selain itu, PTS kesulitan untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan hibah/atau bantuan lain jika harus berkompetisi dengan PT di Pulau Jawa atau dengan pertimbangan status/peringkat akreditasi.

2. Bidang Kebudayaan

Meskipun terjadi pembatasan sosial akibat dari pandemi Covid-19, Provinsi Gorontalo tetap melakukan program-program pemajuan kebudayaan di antaranya menetapkan 21 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Ke 21 WBTB adalah, Upiya karanji, molonthalo, mohuntingo, Tidi Lo Oayabu, Ilabulo, Tili Aya, Tepa tonggo, Turunani, Buruda Gorontalo, Bili'u, Tahuda, Leningo, Molo'opu, Dana-dana, Tidi Lo Tihuo, Tidi Lo Maluo, Amongo, Longgo, Mongubingo, Wunungo, dan Tidi Da'a).

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki pesona daya tarik yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain khususnya pada potensi wisata baharinya serta dapat menjadi destinasi penyangga DSP Likupang. Namun dalam penyelenggaraan pariwisata di Provinsi Gorontalo mengalami kendala di antaranya, kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen amenities, atraksi, maupun aksesibilitas, kurangnya industri usaha pariwisata yang terstandarisasi, dan masih kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten.
2. Masyarakat pelaku pariwisata Provinsi Gorontalo menyampaikan beberapa hal yaitu harga tiket yang sangat tinggi sangat membebani wisatawan berkunjung ke Provinsi Gorontalo, termasuk syarat vaksin booster menjadi kendala masuknya wisman khususnya yang berasal dari negara Eropa yang di negaranya hanya mewajibkan melakukan vaksin dua kali. Selain itu, sektor pariwisata adalah sektor yang tidak mendapatkan perhatian dalam pemberian bantuan kredit bagi pelaku pariwisata dan memiliki skor buruk oleh bank bagi pelaku pariwisata yang melakukan restrukturisasi usahanya.
3. Pariwisata Provinsi Gorontalo membutuhkan SDM yang banyak dan berkualitas, namun saat ini hanya ada prodi pendidikan pariwisata D-3 di UNG namun kurang diminati oleh calon mahasiswa, sehingga diusulkan agar dibukanya jenjang minimal D-4 program bidang pariwisata (managemen hotel) di UNG.
4. Terdapat keluhan pelaku perhotelan atas RUU KUHP pasal perzinahan yaitu aturan syarat bagi *costumer* hotel yang membawa pasangan hanya diperbolehkan bagi yang berstatus pasangan resmi (telah menikah). Pasal RUU ini akan menjadi dasar dilakukannya operasi-operasi penindakan

yang akan mengganggu pengunjung hotel kemudian akhirnya menciptakan iklim usaha perhotelan terganggu.

5. Pemangku pariwisata memberikan masukan atas rencana revisi Undang-Undang Kepariwisata antara lain (1) perlunya pengaturan pemberian apresiasi bagi suatu kawasan dari sisi keunikan dan citra kawasan, (2) Revisi Undang-Undang Kepariwisata mampu meningkatkan penelitian kebutuhan suatu obyek pariwisata, khususnya melalui riset pasar, secara regional, nasional dan global, (3) mampu mendorong bertambahnya jumlah kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), (4) mampu mendorong peningkatan sarana prasarana pariwisata daerah melalui peningkatan DAK, DEKON bidang pariwisata, dan (5) perlu di atur agar CSR perusahaan juga bisa dialokasikan untuk tujuan kepariwisataan

4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Masyarakat Gorontalo menyampaikan aspirasi diantaranya terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan perlu tersosialisasi baik di kalangan Pemerintah, swasta dan masyarakat Gorontalo. Selain itu, diperlukan adanya *sport center* di Provinsi Gorontalo, olahraga tradisional Gorontalo yang dapat ditetapkan menjadi warisan budaya Gorontalo dan penyelenggaraan event nasional maupun Internasional yang dilaksanakan di Gorontalo.
2. Terkait evaluasi terhadap program-program kepemudaan, khususnya dalam hal pemberdayaan pemuda, pengembangan, kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan olahraga prestasi, serta pembinaan gerakan pramuka di Provinsi Gorontalo masih memiliki kendala dan permasalahan diantaranya masih rendahnya Tingkat Pendidikan pemuda, kecilnya anggaran Pembangunan Kepemudaan, belum terpenuhinya pengembangan kepemudaan di Kabupaten dan Kota disebabkan keterbatasan pendanaan kurang tersedia.
3. Pemerintah Gorontalo berharap adanya Sport Center di Provinsi Gorontalo, Olahraga Tradisional Gorontalo yang dapat ditetapkan menjadi warisan budaya Gorontalo dan Penyelenggaraan Event Nasional maupun Internasional yang dilaksanakan di Gorontalo termasuk penguatan regulasi dari Pembinaan Olahraga pada Satuan Pendidikan.

5. Perpustakaan dan Literasi

1. Pemerintah Gorontalo berharap ada kemudahan akses terhadap bahan bacaan, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga perpustakaan, penguatan digitalisasi perpustakaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan.
2. Pemerintah Daerah Gorontalo dibidang literasi memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat.
 - b. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah.

- c. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat.
 - d. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.
 - e. Target sasaran 2023-2026 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebesar 57,64.
3. Indeks pembangunan literasi masyarakat di provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sebesar 28,18, dengan jumlah perpustakaan sebanyak 2.276 yang didominasi jenis perpustakaan sekolah atau madrasah sebanyak 1.314 dengan perpustakaan berSNP sebesar 16,7 % mayoritas dari perguruan tinggi. Sedangkan koleksi buku ada sebanyak 152.068 dengan jenis buku terbanyak sejumlah 23.334 buku IPS dengan buku yang paling banyak dipinjam sebanyak 24.074 buku geografi. Keseluruhan jumlah anggota perpustakaan ada sebanyak 169.657 yang rata-rata kunjungan perhariada 511 orang dengan usia diatas 18 tahun sebesar 54,5%, dengan 75,6% berstatus pelajar atau mahasiswa.

III. REKOMENDASI

A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Tunjangan Guru Profesi (TGF) dan penerapan kurikulum merdeka agar layanan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk meningkatkan kualitas SDM pendidikan khususnya operator sekolah dalam peningkatan kualitas pendataan dan pemanfaatan IT guna menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk terus menerus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan seleksi guru ASN-PPPK dan menyelesaikan permasalahannya, seperti terkait SK, formasi dan kepastian formasi serta anggaran
4. Mendesak Kemendikbudristek RI meningkatkan bantuan langsung kepada mahasiswa di PTS, seperti UKT atau skema bantuan serupa yang memberikan dampak positif terhadap mahasiswa dan pengelolaan manajemen kampus.
5. Menekankan kembali agar kebijakan serta program Kemendikbudristek RI mendukung PTS agar tidak terjadi dikotomi dan diskriminasi antara PTN dan PTS.

B. Bidang Kebudayaan

Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk dapat berperan aktif dan mendukung Pemerintah daerah dalam hal pengelolaan cagar budaya, mengingat Kemendikbudristek RI sebagai kementerian yang memiliki kewenangan dalam bidang cagar budaya

C. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Mendorong Kemenparekraf RI/Baparekraf RI melakukan koordinasi dengan K/L lain dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata di Provinsi Gorontalo sebagai destinasi alam dan budaya unggulan, serta menjadi destinasi pariwisata prioritas penyangga destinasi super prioritas Likupang.
2. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mendukung upaya Pemerintah Gorontalo yang sedang melakukan pembangunan dan pengembangan destinasi baru Teluk Tomoni sebagai destinasi penyangga destinasi super prioritas Likupang dengan melibatkan K/L lain.
3. Mendesak Kemenparekraf RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI, dan K/L terkait lain untuk menyelesaikan persoalan mahalannya tiket penerbangan, mengevaluasi kebijakan syarat masuk wisman harus vaksin booster, dan dukungan kemudahan bantuan kredit usaha pariwisata guna mendukung kebangkitan industri pariwisata pasca pandemi Covid-19.
4. Komisi X DPR RI mendukung pengembangan sumberdaya manusia pariwisata di Provinsi Gorontalo berupa pendirian Prodi Sarjana Terapan Pariwisata D-4 (Manajemen Perhotelan) di Universitas Negeri Gorontalo.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberi dukungan anggaran dan program pelatihan untuk penguatan SDM pelaku pariwisata di Provinsi Gorontalo memanfaatkan layanan digital mempromosikan pariwisata Gorontalo.
6. Mendorong Panja RUU Kepariwisata untuk memperhatikan saran dan masukan dari kepala daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata daerah dalam rangka penyusunan RUU Kepariwisata.

D. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk lebih massif mensosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk memberikan penguatan terhadap penghayatan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dikalangan pemuda yang masih dinilai rendah dengan pembinaan dan pelatihan dalam organisasi kepemudaan.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk meningkatkan alokasi anggaran Pembangunan Kepemudaan mengingat kecilnya anggaran kepemudaan menimbulkan rendahnya kepuasan masyarakat atas Pelayanan Pemberdayaan Pemuda dan kegiatan kepemudaan lainnya khususnya di Provinsi Gorontalo.

E. Bidang Perpustakaan dan Literasi

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI untuk memperluas jangkauan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan memberikan bantuan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca.
2. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI melakukan advokasi dan pengarusutamaan budaya literasi.
3. Komisi X DPR RI mendukung Pemerintah Daerah Gorontalo untuk mewujudkan aspirasi dinas perpustakaan agar disejajarkan dengan OPD lainnya.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Gorontalo, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 1 November 2022

Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

TTD.

Dr. Dede Yusuf M. E. , S.T., M.I.Pol,
A-539